



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN INDEPENDENSI  
AUDITOR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

SKRIPSI

Intan Pratiwi

1702015065

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN INDEPENDENSI  
AUDITOR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

SKRIPSI

Intan Pratiwi

1702015065

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2021

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU”** merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 14 Agustus 2021

Yang menyatakan,



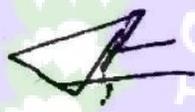
Intan Pratiwi  
NIM 1702015065

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PENERAPAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM  
PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI  
SUMBER DAYA MANUSIA, DAN  
INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
PRINGSEWU

NAMA : INTAN PRATIWI  
NIM : 1702015065  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
TAHUN AKADEMIK : 2020-2021

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi:

Pembimbing I	Enong Muiz. H., SE., M.Si.	
Pembimbing II	Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si.	

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL,  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN INDEPENDENSI  
AUDITOR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

Disusun oleh :  
Intan Pratiwi  
1702015065

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu  
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal : 14 Agustus 2021

**Tim Penguji :**

Ketua, merangkap anggota :

(Bambang Tutuko, SE., Ak., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :

(Ahmad Sonjaya, SE., M.Si.)

Anggota :

(Enong Muiz. H., SE., M.Si.)

**Mengetahui,**

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

(Meita Larasati, S.Pd., M.Sc.)

(Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si.)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Pratiwi  
NIM : 1702015065  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalti Free-right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Agustus 2021  
Yang menyatakan,



(Intan Pratiwi)

## ABSTRAK

**Intan Pratiwi (1702015065)**

### **PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU**

*Skripsi. Program Sarjana Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2021. Jakarta.*

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Independensi Auditor, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) dan Independensi Auditor (X4) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Y) pada Kabupaten Pringsewu.

Variabel yang diteliti yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Independensi Auditor sebagai variabel bebas dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini yaitu pegawai BPKAD Kabupaten Pringsewu. Sampel yang digunakan sebagai responden yaitu pegawai BPKAD Kabupaten Pringsewu sebanyak 22 orang. Data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda, yang diolah dari data primer dengan menggunakan *Eviews 9.0*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai signifikansi  $t\ 0,16 > 0,05$ , Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai signifikansi  $t\ 0,34 > 0,05$ , Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki nilai signifikansi  $t\ 0,97 > 0,05$  dan Independensi Auditor memiliki nilai  $t$  signifikansi  $t\ 0,52 > 0,05$ . Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai signifikansi  $F$  sebesar  $0,000006 < 0,05$ . Dan memiliki nilai *Adjusted R Square* sebesar  $0,767$  sedangkan sisanya yaitu  $0,233$  dipengaruhi oleh variabel lain atau variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel independen lain seperti Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Sistem Informasi Manajemen Daerah dan diharapkan dapat menambahkan sampel karena semakin banyak sampel yang digunakan maka semakin baik data dan hasil penelitiannya.

## **ABSTRACT**

**Intan Pratiwi (1702015065)**

### **THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, INTERNAL CONTROL SYSTEMS, HUMAN RESOURCES COMPETENCE, AND AUDITOR INDEPENDENCE ON THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTS OF THE REGIONAL GOVERNMENTS OF PRINGSEWU REGENCY**

*Skripsi. Program Sarjana Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2021. Jakarta.*

**Keywords :** Government Accounting Standards, Internal Control System, Human Resources Competence, Auditor Independence, Quality of Local Government Financial Reports.

This study aims to determine the effect of Government Accounting Standards (X1), Internal Control System (X2), Human Resources Competence (X3) and Auditor Independence (X4) on the Quality of Local Government Financial Reports. (Y) in Pringsewu.

The variables studied were Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Human Resource Competence and Auditor Independence as independent variables and the Quality of Local Government Financial Reports as the dependent variable. The population in this study are BPKAD employees of Pringsewu Regency. The sample used as a respondent is the Pringsewu Regency BPKAD employees as many as 22 people. The data used is primary data in the form of a questionnaire. Data processing in this research is using descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis, which is processed from primary data using Eviews 9.0.

The results of this study indicate that Government Accounting Standards have a significance value of  $t\ 0.16 > 0.05$ , Internal Control System has a significance value of  $t\ 0.34 > 0.05$ , Human Resource Competence has a significance value of  $t\ 0.97 > 0,05$  and Auditor Independence has a significance  $t$  value of  $t\ 0.52 > 0.05$ . The quality of Local Government Financial Reports has a significance value of  $F$  of  $0.000006 < 0.05$ . And has an Adjusted R Square value of 0.767 while the remaining 0.233 is influenced by other variables or variables not examined in this study.

Therefore, it is recommended for further research to add other independent variables such as Regional Financial Accounting Systems, Information Technology, Organizational Commitment, Regional Management Information Systems and are expected to add samples because the more samples used, the better the data and research results.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam juga saya hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun serta membawa seluruh umatnya menuju zaman yang terang benderang ini. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada orang tua saya karena telah memperjuangkan saya untuk dapat melanjutkan pendidikan sampai akhir dan saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih pula untuk orang tua saya yang tidak pernah berhenti untuk selalu mendoakan dan memberi semangat kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyusun dan membuat skripsi ini, saya banyak mendapat bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
4. Bapak M. Nurrasyidin, SE., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, SE., MM selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Ibu Meita Larasati, S.Pd., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Enong Muiz, H., SE., M.Si Si selaku Dosen Pembimbing I yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya, bimbingan, koreksi, serta arahan selama penyusunan skripsi ini.

8. Ibu Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya, bimbingan, koreksi, serta arahan selama penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama saya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
10. Keluarga, Ahmad Bustomi, Dendy Aditya, yang selalu memberikan *support* dan doa agar penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Dina Mulyani, Risma Widiastuti, Yunita Merlin, teman-teman 8U akuntansi dan teman-teman angkatan 2017 yang telah membantu saya, menenami serta memberi dukungan sehingga saya dapat semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Saya menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan pada saat menyusun dan membuat skripsi ini, oleh karena itu saya mengharap kritik serta saran yang membangun agar terciptanya skripsi yang baik dan sempurna. Saya berharap skripsi ini bisa dijadikan sebagai sarana dan referensi untuk menambah pengetahuan bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkaitan.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Jakarta, 10 Agustus 2021  
Penulis,

*Pratiwi*

(Intan Pratiwi)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	12
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	12
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	13
1.2.3 Perumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Telaah Pustaka.....	45
2.2.1 Agency Theory .....	45
2.2.2 Akuntansi .....	46
2.2.3 Akuntansi Pemerintahan.....	47
2.2.4 Kualitas Laporan Keuangan Daerah .....	48
2.2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan .....	51
2.2.6 Sistem Pengendalian Internal.....	55
2.2.7 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	57

2.2.8	<i>Independensi Auditor</i> .....	58
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	59
2.4	Rumusan Hipotesis .....	62
<b>BAB III METEDOLOGI PENELITIAN</b> .....		64
3.1	Metode Penelitian .....	64
3.2	Operasionalisasi Variabel .....	64
3.3	Populasi dan Sampel .....	69
3.3.1	<i>Populasi</i> .....	69
3.3.2	<i>Sampel</i> .....	70
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	70
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i> .....	70
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	71
3.5	Teknik Pengolahan dan Analisis data .....	71
3.5.1	Statistik Deskriptif .....	71
3.5.2	Uji Kualitas data .....	72
3.5.3	Analisis Regresi Berganda .....	74
3.5.4	Uji Hipotesis .....	75
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....		78
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	78
4.1.1	<i>Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Pringsewu</i> .....	78
4.1.2	<i>Profil BPKAD Kabupaten Pringsewu</i> .....	79
4.1.3	<i>Visi Misi BPKAD Kabupaten Pringsewu</i> .....	80
4.1.4	<i>Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pringsewu</i> .....	81
4.1.5	<i>Deskripsi Data Responden</i> .....	81
4.2	Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan .....	87
4.2.1	<i>Hasil Uji Statistik Deskriptif</i> .....	87
4.2.2	<i>Hasil Uji Kualitas Data</i> .....	88
4.2.3	<i>Analisis Regresi Berganda</i> .....	98
4.2.4	<i>Hasil Uji Hipotesis</i> .....	101
4.3	Interpretasi Hasil Penelitian .....	104
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		110
5.1	Kesimpulan .....	110
5.2	Saran .....	112

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	113
<b>LAMPIRAN</b> .....	121



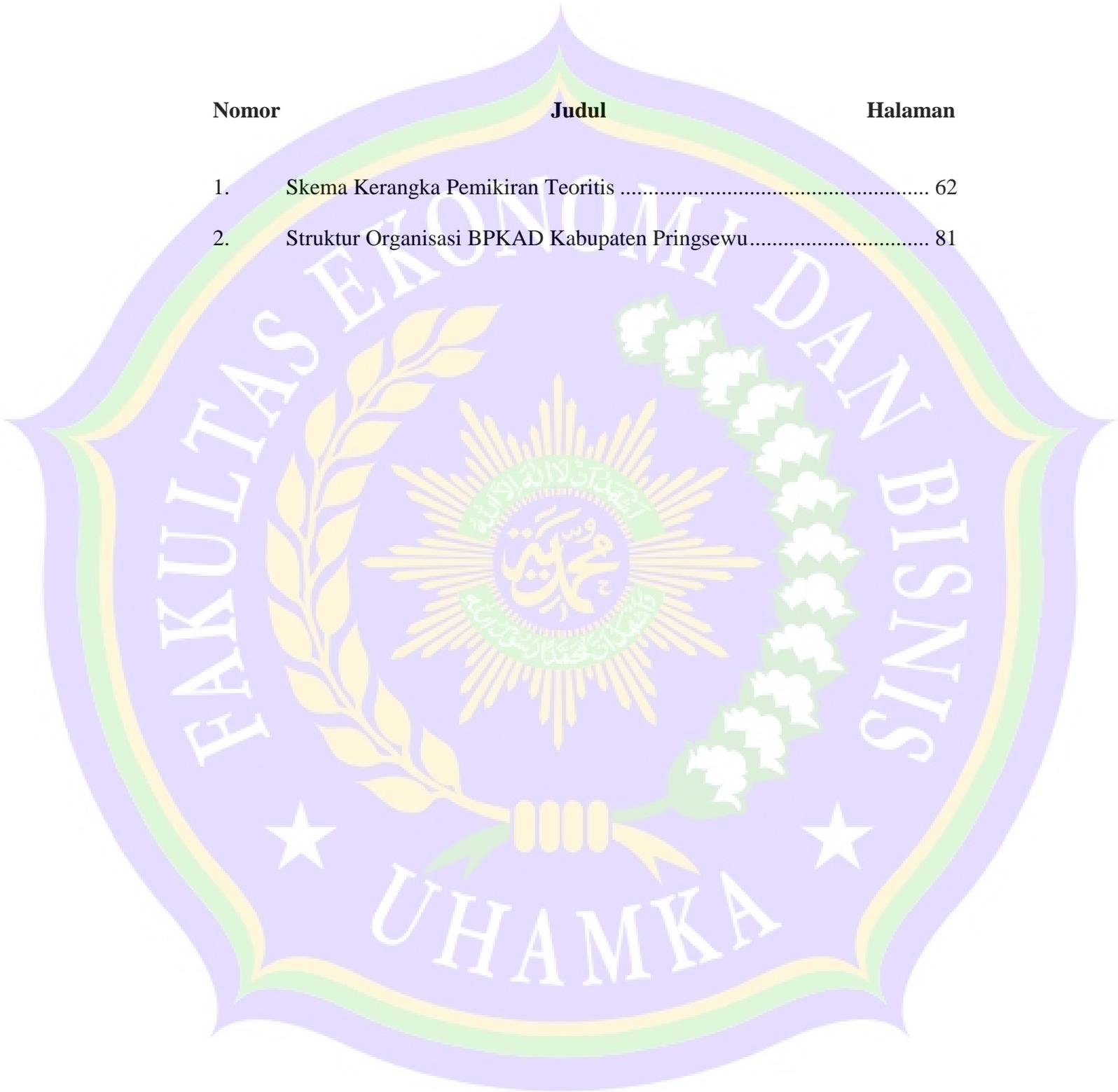
## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	25
2	Operasionalisasi Variabel.....	66
3	Kriteria Pemeilihan Sampel .....	70
4	Skor Berdasarkan Skala Likert .....	71
5	Data Pegawai BPKAD Kabupaten Pringsewu 2017.....	79
6	Data Pengembalian Kuesioner.....	82
7	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	83
8	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	83
9	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir .....	84
10	Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja.....	85
11	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan/Posisi .....	86
12	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	87
13	Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).....	89
14	Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintahan (X1).....	90
15	Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Internal (X2) .....	92
16	Hasil Uji Validitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) .....	93
17	Hasil Uji Validitas Independensi Auditor (X4) .....	94
18	Hasil Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)....	95

19 Hasil Uji Reliabilitas Standar Akuntansi Pemerintahan (X1).....	96
20 Hasil Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Internal (X2).....	96
21 Hasil Uji Reliabilitas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) .....	97
22 Hasil Uji Reliabilitas Independensi Auditor (X4).....	97
23 Hasil Analisis Regresi Berganda.....	99
24 Hasil Uji F.....	101
25 Hasil Uji t.....	102
26 Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	103
27 Hasil Pengujian Hipotesis .....	104

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis .....	62
2.	Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Pringsewu.....	81



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Surat Tugas .....	122
2.	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing I .....	123
3.	Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing II.....	124
4.	Kuesioner Penelitian .....	125
5.	Hasil Jawaban Responden.....	130
6.	Hasil <i>Output Eviews 9.0</i> dan Hasil <i>Output SPSS 26</i> .....	131
7.	Daftar Riwayat Hidup .....	147

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (PSAP No. 1 Tahun 2010).

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan tersebut harus memiliki karakteristik kualitatif. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan, sehingga memenuhi tujuannya, antara lain : Relevan yaitu laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Andal yaitu laporan keuangan bisa dikatakan andal apabila informasi yang termuat bebas dari pengertian yang

menyatakan dan kesalahan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Dapat dibandingkan yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Untuk memperoleh hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas, maka prinsip-prinsip akuntansi harus diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sekarang diubah menjadi PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas baik. Untuk dapat mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) pemerintah harus melakukan berbagai upaya-upaya yang dapat menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada tahun 2020 adanya pandemi Covid-19 merupakan kejadian luar biasa. Namun penanganan pandemi Covid-19 tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan penganggaran yang sepenuhnya di bawah kendali pemerintah. Dampak penanganan pandemi Covid-19 mempengaruhi kebijakan fiskal pemerintah dan berdampak pada makro ekonomi sehingga mempengaruhi hampir seluruh pos dalam anggaran keuangan. Akan tetapi tidak

diperlukan penyajian pos khusus dalam Laporan Operasional dan penambahan pos baru dalam Laporan Keuangan.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan kebijakan fiskal dan penganggaran. Pemerintah Pusat dan Daerah merevisi APBN/APBD TA.2020 melalui *refocusing* dan realokasi belanja non-prioritas untuk dialihkan pada upaya percepatan penanganan dampak pandemi Covid-19. Perubahan anggaran tersebut direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dalam bentuk LKPP/LKPD. Transaksi keuangan pemerintah yang terkait dengan langkah dan kebijakan ini dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2020).

Dalam PMK No.43 Tahun 2021 juga diatur upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan pinjaman pemulihan ekonomi nasional untuk pemerintah daerah akibat dampak pandemi Covid-19. Maka pertanggungjawaban pemerintah publik secara umum dapat dilihat pada laporan keuangan pemerintahan yang menggambarkan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan. Kualitas laporan juga semestinya harus sesuai, sehingga tidak menimbulkan perbedaan persepsi.

Permasalahan terkait kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kini menjadi isu hangat yang ramai dibicarakan, temuan kasus berkenaan dengan buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menjadi hal yang perlu dikaji secara mendalam. Ini adalah bukti minimnya pemahaman terkait

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang belum memadai, serta kurangnya kompetensi staf akuntansi atau kompetensi sumber daya manusia yang masih minim sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Udiyanti, N. L. N. A., Atmadja, A. T., SE, A., Darmawan, N. A. S., & SE, A, 2014).

Permasalahan ini dibuktikan dengan diperolehnya opini *disclaimer* di beberapa instansi pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Opini *disclaimer* diberikan terhadap laporan keuangan karena Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengalami kesulitan dalam menerapkan prosedur audit pada beberapa pos yang disajikan. Rendahnya kualitas laporan keuangan, secara umum disebabkan penyusunan laporan keuangan yang belum memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang belum memadai dan minimnya kompetensi staff akuntansi yang menyusun laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih relatif sedikit. Masih sedikitnya LKPD yang memperoleh opini WTP di Indonesia menjadi suatu fenomena penting untuk dianalisis, mengingat capaian LKPD masih dibawah target (IHPS I BPK RI Tahun, 2015).

Dari data hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015 atas 504 LKPD kabupaten/Kota tahun 2014 menunjukkan opini WTP diberikan atas 251 entitas termasuk entitas dengan opini WTP-Dengan Paragraf Penjelas (DPP) (49,80%), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 230 entitas (45,64%),

opini Tidak Wajar (TW) atas 4 entitas (0,79%) dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atas 19 entitas (3,77%). Berdasarkan fakta tersebut, maka diketahui masih terdapat permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan (Somad, A., Made, A., & Yogivaria, D. W, 2016)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2018. Total ada 700 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dihasilkan oleh BPK pada semester I-2018. Melansir buku IHPS I 2018, Selasa (2/10/2018), 700 LHP itu terdiri dari 120 LHP pemerintah pusat, 38 LHP BUMN dan badan lainnya, serta 542 LHP pemerintah daerah. Dari total LHP itu menghasilkan 9.808 temuan yang berujung pada 26.871 rekomendasi dan 15.773 permasalahan (*finance.detik.com*, 09 Juni 2020).

Bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah mengharuskan lembaga pemerintah memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja kepada publik. Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran dituangkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan ini mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005. Proses pelaporan keuangan pemerintah daerah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pada SAP dan aturan lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.05 Tahun 2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah mengacu pada akuntansi berbasis akrual. Sementara untuk pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020 menyatakan bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Sebuah keharusan bagi pemerintah daerah untuk menyusun sebuah laporan keuangan sesuai standar dan berkualitas. Kualitas laporan keuangan daerah mencerminkan sebuah kepatuhan dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Indikator sebuah laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan sudah berkualitas jika memenuhi kriteria dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Jannah, M. (2019) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu acuan dalam menyusun laporan keuangan. SAP juga merupakan landasan dasar yang penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dengan adanya pemahaman yang baik terhadap SAP, maka akan dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang disusun sesuai SAP akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andal serta

berguna dalam menentukan keputusan. Semakin tinggi penerapan SAP maka kualitas LKPD yang dihasilkan cenderung semakin baik.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh (Ningtyas dan Widyawati, 2015) menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T, 2016) menyatakan bahwa SAP berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, hal ini disebabkan karena terjadi perubahan peraturan dalam waktu yang sangat singkat sehingga menyulitkan pejabat pengelola keuangan dalam memahami standar yang menjadi acuan di dalam penyusunan laporan.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah mewajibkan laporan keuangan direview oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diaudit. *Review* atas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat

Kabupaten. Laporan Keuangan yang disajikan harus berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Semakin tinggi SPIP maka kualitas LKPD yang dihasilkan cenderung semakin baik.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh (Dariana, D., & Oktavia, J, 2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Budiawan, D. A., & Purnomo, B. S, 2014) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Menurut Permendagri Nomor 11 Tahun 2018 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai Aparatur Sipil Negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, berdayaguna dan berhasilguna.

Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kerjanya. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia, maka laporan keuangan yang disusun dapat disajikan tepat pada waktunya sehingga dapat segera digunakan untuk pengambilan keputusan. Jika kompetensi sumber daya manusianya baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan

yang bebas dari salah saji material dan pengertian yang menyesatkan (Wati, K. D., Herawati, N. T., AK, S., & Sinarwati, N. K., 2014).

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Adanya kompetensi sumber daya manusia maka akan mendukung ketepatan waktu pembuatan laporan keuangan (Pujanira, P., & Taman, A, 2017). Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki SDM maka kualitas LKPD yang dihasilkan cenderung semakin baik.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh (Riandani, R.,2017) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Sukmaningtyas, S., & Adi, S. W, 2017) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena kondisi pendidikan pegawai yang bekerja pada DPPKAD mayoritas bukan pendidikan akuntansi sehingga pegawai menemukan kesulitan dan berdampak pada keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan sehingga tidak dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa independensi adalah suatu sikap dan tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan

untuk tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Pemeriksa harus objektif dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Pemeriksa juga harus bertanggung jawab untuk terus-menerus mempertahankan independensi dalam pemikiran (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka kualitas LKPD yang dihasilkan cenderung semakin baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan (SAP). Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pada Tahun 2007 BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengaruh independensi auditor terhadap kualitas laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh (Novyarni dan Nelli, 2014) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Fitrawansyah dan Syahnifah, 2018) menyatakan bahwa independensi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena ada beberapa aspek yaitu variabel dan objek penelitiannya yang biasa diteliti disektor *private* kemudian dicoba untuk melakukan penelitian disektor publik. Dalam hal variabel independen yang digunakan yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Independensi Auditor. Sementara dalam hal objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

Kabupaten Pringsewu adalah salah satu dari 12 kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan UU No.48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI H.Mardiyanto, pada tanggal 3 April 2009 di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta. Kabupaten Pringsewu berjarak 38 km dari ibukota Provinsi Lampung Kota Bandar Lampung, mempunyai luas wilayah 625 km<sup>2</sup>, berpenduduk 368.318 jiwa (data dalam UU No.48 Tahun 2008). Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Pardasuka, Gadingrejo, Sukoharjo, Ambarawa, Adiluwih, dan Kecamatan Banyumas, serta terdiri dari 96 pekon atau desa dan 5 kelurahan.

Untuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Pringsewu mendapatkan opini WDP (Wajar Dalam Pengecualian) pada tahun 2014. Kemudian untuk LKPD tahun 2015 sampai dengan 2019 Kabupaten Pringsewu mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan independensi auditor sehingga peneliti mengambil judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intrenal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.”

## **1.2 Permasalahan**

### *1.2.1 Identifikasi Masalah*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
5. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

### 1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mencapai tujuan penelitian agar lebih terarah dan menimbang keterbatasan yang ada, maka peneliti membatasi masalah atau ruang lingkup penelitian hanya pada pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian Internal ( $X_2$ ) Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai ( $X_3$ ), dan Independensi Auditor sebagai ( $X_4$ ) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu ( $Y$ ).

### 1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Independensi Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu?”

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu.

4. Untuk mengetahui pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pringsewu.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi untuk penelitian sejenis di masa mendatang yang dibutuhkan bagi akademik.

2. Bagi Praktisi

Sebagai informasi masukan yang membantu pemerintahan dalam mengambil keputusan yang berguna untuk menilai sejauh mana penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Independensi Auditor mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, M., & Winarningsih, S. (2016). *Effect Of Auditor And Internal Control Competence Apparatus For Local Government Quality Of Financial Reporting. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 4(7), 113-127.
- Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I* Vol. 24 No. 1.
- Arfan, M., & Darwanis, I. A. M. (2016). *The Effect Of Understanding Of Government Accounting Standard And Internal Control System On Quality Of Finacial Statement From Local Government Through Review Process Of Financial Statement By Inspectorate Agency. Research journal of finance and accounting*, 7(4).
- Badan Kepegawaian Negara. (2019). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. (2015). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I.
- Budiawan, D. A., & Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kekuatan Koersif Terhadap Kualitas Laporan Keuanganpemerintah Daerah (studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.

*Committee of Sponsoring Organization (COSO) of The Treadway Commission.* (2013). *Internal Control – Integrated Framework: Executive Summary.*

Dariana, D., & Oktavia, J. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 77-105.

Dewi, P. M. O. (2020). Pengaruh Moralitas Individu, Transparansi, Pengawasan, Efektifitas Internal Control dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Pencegahan Kecurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (*Doctoral dissertation*, Universitas Pendidikan Ganesha)

Dr. Muslim A. Djalil, S. M. (2017). *Influence of Implementation of Government Accounting Standard and the Effectiveness of Government's Internal Control System on the Quality of Local Financial Report and Its Impact Toward the Accountability of Regional Financial Management . Research Journal of Finance and Accounting , 106-114.*

Fauzi, R. A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi).* Yogyakarta: Deepublish.

*Finance detik.com.* Jakarta, 09 Juni 2020.

Fitrawansyah, F., & Syahnifah, M. (2018). Pengaruh Independensi Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015) ”. *Akuntabilitas , 11 (2), 245-256.*

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan.* Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasibuan, R. P. S., & Syahrial, H. (2019, August). *Analysis Of The Implementation Effects Of Accrual-Based Governmental Accounting Standards On The Financial Statement Qualities. In Proceeding ICOPOID 2019 The 2nd International Conference on Politic of Islamic Development (Vol. 1, No. 1, pp. 18-29)*

- Haty Ramadhan, F., & Trisnawati, R. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Herry. (2016). Akuntansi Keuangan Menengah. Cetakan Satu, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Jurnal akuntansi*, 2(3).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2020). Standar Akuntansi Keuangan. PSAK No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Iskandar, D., & Setiyawati, H. (2015). *The effect of internal accountants' competence on the quality of financial reporting and the impact on the financial accountability. International Journal of Managerial Studies and Research*, 3(5), 55-64.
- Jannah, M. (2016). Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Peran Sarana Prasarana Pendukung terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul).
- Jensen, M., C., dan W. Meckling, 1976. "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure", *Journal of Finance Economic* 3:305- 360
- Kartikahadi, Hans., Rosita Uli Sinaga., Merliyana Syamsul, dan Silvia Veronica Siregar. (2016). Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS.
- Kasim, E. Y. (2015). *Effect of government accountants competency and implementation of internal control to the quality of government*

*financial reporting. International Journal of Business, Economics and Law*, 8(1), 97-105.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2020). Panduan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pada Masa Pandemi Covid-19.

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan No.43 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Menimbang Untuk Pemerintah Daerah.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Keuangan No.238/PMK.05 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 7(2).

Muda, I., Wardani, D. Y., Maksum, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). *The Influence Of Human Resources Competency And The Use Of Information Technology On The Quality Of Local Government Financial Report With Regional Accounting System As An Intervening. Journal of Theoretical & Applied Information Technology*, 95(20).

Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2015). Pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(1).

Nova, WS (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Komitmen Karyawan, Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuanganpemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *Jurnal Akuntansi* , 3 (1).

- Novyarni, N. (2014). *Influence of internal auditor competence and independence on the quality of financial reporting by municipal/provincial government. International Journal of Economics, Commerce and Management*, 2(10), 1-13.
- Nurlaila. (2014). *Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Makasar: Universitas Hasanudin.
- Nurlis. (2018). *The Effect of The Government Accounting Standards Implementation and Apparatus Competency on the Quality of the Local Government Financial Reporting (Case Study at Klaten District Government)*. *Research Journal of Finance and Accounting* , 63-69.
- Paula, Ezra Mentu and Jullie J. Sondakh. (2016). *Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut*. Vol.4 No.1 Maret 2016, 1392-1399. ISSN 2303-1174.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. PSAP No. 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Pramudiana, Agatha Arne. (2017). *Evalasi Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Cilacap)*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan*

pemerintah daerah provinsi DIY. Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen, 6(2), 14-28.

Ratnasari, Riani. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Survei Pada Pemerintah Daerah Kota Bandung). Skripsi. Unpas Bandung.

Riandani, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). Jurnal Akuntansi, 5(2).

Sihite, RN, & Holiawati, H. (2017). Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Staf Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Aset (Akuntansi Riset) , 9 (2), 81-92.

Somad, A., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Malang). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 4(2).

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Sukmaningtyas, S., & Adi, S. W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah/DPPKAD Kabupaten Boyolali) (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Suwanda, Dadang. (2015) Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual. Jakarta: PPM Manajemen.

Synthia, S. (2017). *The Effect of Human Resources Competence and Application of Regional Financial Accounting Systems on Quality of Financial Report. Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2(1), 68-74.

TA (Tengku) Yunita. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Skpd Kota Dumai). Riau *University*.

Tim Penyusun. (2014). Pedoman Penyusunan Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Udiyanti, N. L. N. A., Atmadja, A. T., SE, A., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1)

Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Wahyudi, Purwanto. (2016) Prosedur Audit Pemeriksaan: Satuan Pemeriksaan Internal. *Jurnal UIN Alauddin*.

Warren, Carl S., Reeve, James M., dan Duchac, Jonathan E. (2014). *Accounting-Indonesia Adaptation 25th Edition*. Jakarta: Salemba Empat.

Wati, K. D., Herawati, N. T., AK, S., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).

[www.bpkad.pringsewukab.go.id](http://www.bpkad.pringsewukab.go.id)

[www.lampung.bpk.go.id](http://www.lampung.bpk.go.id)

